TRIBUN PONTIANAK

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2020

Hal.: 1

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

KPK Segera Sidangkan Kasus Gidot

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyidangkan kasus suap Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius. Keduanya tersangkut kasus suap proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tahun 2019.

"Hari ini dilakukan penyerahan terhadap dua tersangka kepada penuntut umum atau tahap dua," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (31/12).

Namun demikian, Ali tidak mengungkap kapan keduanya mulai disidangkan dan lokasi persidangan Suryadman dan Aleksius.

Pada awal November 2019, KPK juga telah melimpahkan berkas dan barang bukti ke tahap penuntutan untuk empat tersangka lainnya dari unsur swasta, masing-masing Rodi, Yosef, Bun Si Fat, dan Nelly Margaretha.

Keempatnya merupakan pihak pemberi dalam kasus suap tersebut. Dalam kasus itu, KPK juga telah menetapkan satu tersangka lainnya,

■ Bersambung ke hal. 7

KPK Segera Sidangkan Kasus Gidot

Sambungan Hal.1

yakni Pandus dari unsur swasta yang merupakan pihak pemberi. Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa Suryadman meminta uang kepada Aleksius.

Permintaan uang tersebut dilakukan Suryadman atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp 7,5 miliar dan Dinas Pendidikan Rp 6 miliar.

Suryadman diduga meminta uang kepada Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Agustinus Yan masing-masing sebesar Rp 300 juta. Uang tersebut diduga diperlukan Suryadman untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Aleksius menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal.

Hal itu dilakukan dikarenakan uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan bupati. Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung dimintakan setoran sebesar Rp 20-25 juta atau minimal sekitar 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp 200 juta.

Kemudian, Aleksius menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati *fee* sebagaimana disebut sebelumnya, terkait paket pekerjaan penunjukan langsung melalui staf honorer pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Fitri Julihardi.

Rinciannya, pertama Rp 120 juta dari Bun Si Fat, Rp 160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi serta Rp 60 juta dari Nelly Margaretha. Dalam kegiatan tangkap tangan kasus tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa handphone, buku tabungan, dan uang sebesar Rp 336 juta dalam bentuk pecahan Rp 100 ribu.

Minta Siapkan Uang

Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot membenarkan bahwa dirinya yang meminta sejumlah uang kepada para kepala dinas di jajaran Pemkab Kabupaten Bengkayang. Pernyataan ini diungkapkan Gidot menjawab pertanyaan *Tribun* seusai dirinya memberikan kesaksian di persidangan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak, Jl Uray Bawadi, Selasa 10 Desember 2019.

Gidot mengungkapkan, uang ini dimintanya dari para pengusaha dan kepala dinas untuk menyelesaikan permasalahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) atau Bankeu untuk 48 desa di Kabupaten Bengkayang. Ia pun menepis bahwa uang tersebut bakal diberikan kepada Polda Kalbar.

"Yang jelas ini dalam rangka menyelesaikan Bankeu, itu saja. *Ndak* ada uang mau diserahkan ke Polda. Itu untuk menyelesaikan Bankeu (Bantuan Keuangan Khusus – **Red**) dalam rangka menyelesaikan LHP BPK. Itu saja," ungkapnya.

Ia kemudian mengulang pernyataannya bahwa uang tersebut untuk penyelesaian LHP dari 48 desa. "Seperti yang saya sampaikan tadi. Peruntukannya untuk ahli hukum dan negara. Kita mau konsultasi ahli hukum pidana. Kemudian, kita mau cari konsultan yang mau membantu 48 kepala desa yang mau menyelesaikan LHP dan kita menyiapkan cadangan penasihat hukum, apabila ada masalah tentang ini. Itu aja," paparnya.

"Itukan bantuannya ke desa, pasti untuk ke desa untuk menyelesaikan laporan. Ini tentang Bankeu (Bantuan Keuangan Khusus) untuk percepatan membangun dalam rangka menuju desa mandiri," tambahnya.

Saat *Tribun* mencoba menegaskan tentang permintaan uang kepada para kepala dinas dengan nominal Rp 1 miliar, Gidot pun membenarkan hal tersebut. "Ya itu tadi, rencananya," tutupnya. **(tribunnews.com)**